

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2 0 1 8



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Kompas	Sindo	Tempo
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Indopos	Pos Kota	Warta Kota	

## RW Kumuh Target CAP

Pemprov DKI Jakarta bersama warga tengah berupaya merevitalisasi kampung. Namun, ada masalah terkait kinerja konsultan dan warga yang berhak menjadi sasaran penataan.

**JAKARTA, KOMPAS** — Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta mengelakkan pembangunan tiga hunian sementara warga serta pembangunan sarana dan prasarana utilitas di 10 RW sebagai realisasi program Community Action Plan Tahun 2018.

Pada rapat Badan Anggaran DKI Jakarta, Kamis (13/9/2018), usulan anggaran pembangunan hunian sementara (*shelter*) untuk Bukit Duri sudah disetujui Rp 5,9 miliar. Dua *shelter* lain yang sudah terbangun dengan dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSB), yaitu Kampung Akuarium dan Kampung Kunir.

Pelaksana Tugas Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta Meli Budianti belum bisa menastikan kapan *shelter* Bukit Duri bisa selesai terbangun. Hal ini karena masih menunggu proses penggunaan lahan.

Rancangan bangunan akan sama dengan *shelter* di Kampung Akuarium dan Kampung Kunir, yakni seluas 3 x 6 meter persegi per unit. Shelter ini akan diperuntukkan bagi 49 keluarga dari penggusuran Bukit Duri yang mengajukan *shelter*.

Untuk 27 kampung susunan program Community Action Plan seperti disebutkan dalam Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 878 Tahun 2018 tentang Gugus Tugas Penataan Kampung dan Masyarakat, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta hanya mendapat tugas membangun *shelter*.

Acapun keseluruhan program berada di bawah koordinasi Sekretaris Dinas DKI Jakarta yang akan melibatkan saluran kerja perangkat daerah (SKPD) lainnya. Program CAP menitikberatkan pada penataan kampung dengan melibatkan masyarakat yang menjadi sasaran penataan. Tugas ini dibagi sesuai bidang SKPD. "Koordinasi kami selama ini mendengarkan usulan masyarakat, melihat aturannya dan cari mewujudkannya," katanya.

Tugas utama Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dalam program CAP ini adalah penataan kawasan di 200 RW kumuh selama lima tahun ke depan. Penataan ini terdiri dari pembangunan instalasi pengelolaan air limbah, penataan jalan, saluran, pencangan, penghijauan, dan pengelolaan sampah.

Tahun ini ada dua RW di setiap kota di Jakarta yang menjadi sasaran, yaitu di Ancol dari Penjaringan, Jakarta Utara, sekitar Rp 9,2 miliar; di Cipinang Besar Utara dan di Cakung Besar, Jakarta Timur, sekitar Rp 8,8 miliar; di Kramat Pela dan Tejal Parang, Jakarta Selatan, Rp 7 miliar; di Catur dan Duri Pluit, Jakarta Pusat sekitar Rp 7 miliar; dan dua RW di Jakarta Barat sekitar Rp 7 miliar.

Menurut Meli, penataan RW kumuh ini tetap mengacu program sebelumnya, yaitu pertama kampung terpadu Muhammad Husni Thamrin (MHT) Plus yang sudah dicetuskan Gubernur DKI Jakarta periode 1966-1977 Ali Sadikin. Pada 2012, MHT Plus kembali cihidupkan Joko Widodo saat menjelang Gubernur PKI.

### Diawali 16 kampung

Program CAP sebelumnya dimulai oleh perwakilan 16 kampung dan sejumlah aktivis penataan kota yang terdiri atas sejumlah lembaga dan latar belakang. Pada awalnya, CAP merupakan kelanjutan dari kontrak politik yang dibuat pada 8 April 2017 oleh Gubernur Anies Baswedan dengan pihak pemberdayaan masyarakat kota, seperti Jaringan Rakyat Miskin Kota (JRMK).

Sebanyak 16 kampung ditetapkan dalam program tersebut pada saat peluncuran persiapan CAP di Weduk Pluit, pertengahan Januari lalu. Belakangan, jumlahnya bertambah menjadi 21 kampung yang tersebar dalam beberapa RW di lima wilayah kota di Jakarta. Kampung-kampung ini ditetapkan dalam Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 878 tahun 2013 tentang Gugus Tugas

Penataan Kampung dan Masyarakat.

Sebagai program perencanaan pembangunan, CAP dimulai lebih baik ketimbang musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang). "Kami misi resah kita tidak bisa koreksi, setelah (rencana) jadi. Kalau CAP kita bisa koreksi. Ada tingkatkan (koreksinya) di konsultan dan kepala dinas," kata Koordinator JRMK Jakarta Eni Rochyati, Sabtu (15/9/2018).

Hal ini dapat menjadi awal perubahan pola pikir dan praktik pembangunan di Jakarta.

### Beda pemahaman

Terkait perubahan sasaran program CAP dari 16 kampung menjadi 21 kampung, peran sebagian konsultan dalam program CAP dipertanyakan. Konsultan yang diharapkan menjembatani antara warga dan pemerintah belum dirasakan memahami konsep dasar dan realisasi CAP. Konsultan menjadi pihak yang baru ada ketika CAP diresmikan menjadi program pemerintah. Ia tidak ada saat program ini digagas di 16 kampung.

"Konsultan ada plus dan minusnya. Plusnya, ada beberapa konsultan yang duduk bersama tim kerja. Untuk menjangkau masyarakat, belum," kata Eni.

Sehari-lier, Eni tinggal di Kampung Marlina, Penjaringan, Jakarta Utara, salah satu di antara 16 kampung yang sejak mula diprioritaskan dalam program CAP. Menurut dia, konsultan belum memahami bahwa kampung sasaran awal program CAP berbeda dengan RW kumuh di data Bapenda Pusat Statistik (BPS).

Siti Maemunah, salah seorang warga dan anggota tim kerja untuk CAP di Kampung Tongkol, Jakarta Utara, mengatakan, fokus perhatian sebagian konsultan cenderung ke aspek teknis dari pembangunan fisik. Padahal, CAP berujuan mewadahi kebutuhan warga yang bisa diketahui dari dialog intensif antara pem-

rintah, konsultan, dan tim kerja warga. Hasilnya beberapa program CAP berujung pada rencana desain dan anggaran yang belum sesuai kebutuhan warga. "Untungnya di sini sebelum konsultasi datang, kami sudah merancang 'pre' CAP," ujar Siti.

"Pre" CAP adalah rancangan hasil kolaborasi warga kampung dengan sejumlah pendamping dari berbagai latar belakang, termasuk akademisi. Ini berjalan di 16 kampung prioritas yang komunikasi diajukan sebagai kampung prioritas program CAP.

Salah satu konsultan di Jakarta Utara meminta agar Kompas menghubungi dinas terkait. Jika pihak dinas memberi lampu hijau, baru ia bersedia memberi konfirmasi terkait kritik terhadap konsultasi awal CAP tersebut.

### Masih menunggu

Warga Kampung Akuarium, Penjaringan, Jakarta Utara sebagai sasaran program CAP, masih menunggu detail perencanaan pembangunan kampung mereka. Diharapkan detail rencana yang dibuat warga dan konsultan selesai akhir September ini.

Koordinator warga Kampung Akuarium, Dharmawati Dwi atau Yani Munggu (16/9), mengatakan, diskusi CAP yang melibatkan warga dengan konsultan su-

dah sejak Mei lalu. Kurang lebih sebanyak lima kali pertemuan yang diadakan dengan pihak konsultan. Menurut Yani, masih ada keinginan warga yang belum terpenuhi. "Tunggu selesai dulu rencana (CAP), baru kami bisa lihat (karangnya)," kata Yani.

Pada April 2016, Kampung Akuarium ditetapkan terkait rencana revitalisasi kawasan cagar budaya bantaran Jakarta. Warga disediakan relokasi di rumah susun sederhana. Kini Kampung Akuarium akan kembali berdiri di lokasi semula melalui program CAP dari diprojeksikan menjadi penggerak utama kampung wisata bantaran.

Namun, saat ini, untuk kepastian berapa jumlah warga

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2 0 1 8



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Kompas	Sindo	Tempo
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Indopos	Pos Kota	Warta Kota	

## RW Kumuh Target CAP

yang dapat ditampung kembali belum jelas benar. Sebagian warga sekelurnya sudah menciptakan ketika dipindahkan ke beberapa unit rumah susun sederhana sewu. Sebagian lagi, sekitar 90 keluarga, memilih bertahan. Warga yang bertahan itulah yang sementara ini menjadi sasaran program CAP.

(INK/TRF/JOG/E10)

### Program Community Action Plan Pemprov DKI Jakarta

Community Action Plan (CAP) disebut juga Rencana Tindak Warga. Program ini bertujuan untuk mendorong warga agar dapat mandiri dalam merencanakan, melaksanakan, dan memelihara kualitas Kawasan permukiman.

Gagasan: Kerja sama pemda dan warga untuk membangun kampung di Jakarta.

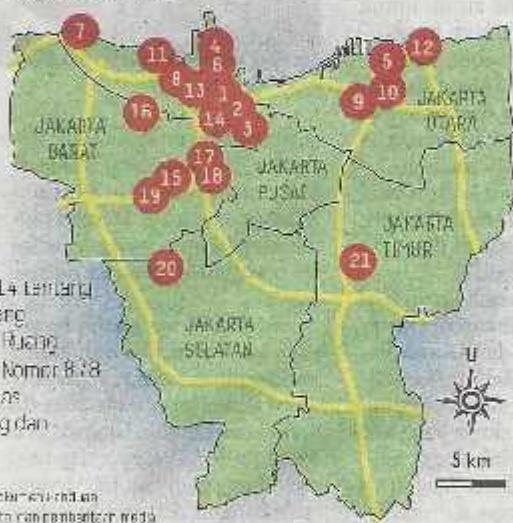
Peluncuran Program: 14 Januari 2018 di Maduk Pluit, Jakarta Utara.

Sumber Anggaran: APBD

Regulasi:

- UU Nomor 1 tahun 2012 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman
- UU Nomor 23 Tahun 2009 tentang Perencanaan Daerah
- Permen PU/PUPR Nomor 2/PRT/V/2016 tentang Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh
- Permen PU Nomor 1/PRT/M/2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pengiriman Lahan dan Pemasaran Rumah
- Surat Keputusan (SK) Gubernur Nomor 8/18 Tahun 2016 tentang Rancangan Pelaksanaan Renovasi Kampung dan Masyarakat

Sumber: UU No. 1 Tahun 2012 dan UU No. 23 Tahun 2009 tentang Perencanaan Daerah, Permen PU/PUPR Nomor 2/PRT/V/2016 tentang Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, Permen PU Nomor 1/PRT/M/2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pengiriman Lahan dan Pemasaran Rumah, SK Gubernur Nomor 8/18 Tahun 2016 tentang Rancangan Pelaksanaan Renovasi Kampung dan Masyarakat



#### Pihak yang terlibat

Penanggung Jawab: Jinas Perumahan, yakni di Kawasan Permu kumuh di seluruh DKI Jakarta

Kerja sama: Warga dan pambaga swadaya masyarakat Daerah Sasaran:

##### Jakarta Utara

1. Akbar Iman
2. Indah
3. Maka
4. Merlina
5. Sertu no. Pompa
6. Elektro
7. Tanjek
8. Kerang
9. Duri Tembok Batu Gong
10. Welang
11. Blok Empang
12. Kerang Jl.
13. Tanah Merah

##### Jakarta Barat

14. Cunti
15. Gaji Bet.
16. Kel. Ajuan
17. Rawa Barat
18. Sekresaris

##### Jakarta Selatan

20. Ben

##### Jakarta Timur

21. Pampong



INFOGRAFIK ALFRED PRO